

**IDEOLOGI PEMBANGUNAN ORDE BARU
DALAM SASTRA ANAK BALAI PUSTAKA TAHUN 80-AN**
New Order Era's Development Ideology in Balai Pustaka's Children Literature in the 80's

Partiningsih

Prodi Ilmu Sastra, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada
Jalan Sosiohumaniora, Bulaksumur, Yogyakarta, Indonesia
Telepon (0274) 901136, Faksimile (0274) 550451,
Pos-el: aningnaafiah@rocketmail.com

(Naskah Diterima Tanggal 7 Januari 2016—Direvisi Akhir Tanggal 11 April 2016—Disetujui Tanggal 11 April 2016)

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi munculnya karya sastra anak terbitan Balai Pustaka tahun 1980-an yang berisi gagasan pembangunan Orde Baru. Di era ini juga muncul berbagai sastra lain baik yang mendukung dan yang berbeda dengan estetika sastra Orde Baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui topik atau isi karya sastra anak Balai Pustaka dan mengungkap strategi kuasa Orde Baru dalam menghegemoni dunia kesastraan. Teori yang digunakan adalah teori hegemoni Gramsci. Objek material yang digunakan adalah karya sastra anak Balai Pustaka tahun 80-an. Objek formalnya adalah ideologi Orde Baru dalam sastra anak Indonesia era 80-an. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karya sastra anak Balai Pustaka menjadi alat untuk mendoktrin kekuasaan Orde Baru dalam pikiran anak-anak melalui gagasan dan konsep pembangunan Indonesia. Selain itu, Orde Baru membuat konsep estetika sastra untuk mencegah berkembangnya estetika yang lain, seperti realisme sosialis ataupun Islam. Selanjutnya, kuasa Orde Baru menjalankan doktrin ideologinya dengan cara menguasai bacaan anak di Indonesia.

Kata-Kata Kunci: sastra anak Balai Pustaka, hegemoni, kuasa

Abstract: The background of this research is that children literatures Balai Pustaka in the 80s contains the development idea of New Order. In this era, there appeared other children literatures which either supported or opposed the New Order aesthetic concepts of literature. The phenomenon shows the conflict and hegemonic strategy in aesthetic children literature, especially by Balai Pustaka. The problem is the topic of children literatures Balai Pustaka in the 80s and the strategy of New Order to dominate and control the literature aesthetic to legitimate their power. The research uses Gramscian hegemony concepts. The object of this research is the children literatures published Balai Pustaka in the 80s and the hegemonic strategy by New Order in children literatures. The result of this research is that the children literatures Balai Pustaka in the 80s had become an instrument of New Order indoctrination. The discourse of the development of Indonesia was used to legitimate the New Order power. The New Order banned the other aesthetic concepts, like social realism or "Islamic literature aesthetic". The power of New Order implemented their ideology indoctrination by dominating and controlling the Indonesian children literature.

Key Words: hegemony, power, Balai Pustaka children literatures

PENDAHULUAN

Menurut Sarumpaet (2010) kesadaran untuk membangun budaya melalui sastra anak di Indonesia cukup besar, tetapi tertahan oleh keadaan ekonomi yang

buruk. Itulah sebabnya pada tahun 1970-an pemerintah mengadakan Proyek Pengadaan Buku Inpres untuk mendorong pertumbuhan perbukuan pada umumnya dan sastra anak khususnya di

Indonesia. Penerbit yang diberi tugas untuk menjalankan hal itu adalah Balai Pustaka, yang menunjukkan prestasi gemilangnya pada tahun 1980-an (hlm. 21).

Sastra anak Balai Pustaka yang terbit pada tahun 80-an itu ditulis oleh para praktisi pendidikan dari berbagai wilayah di Indonesia melalui lomba menulis bacaan untuk anak-anak Indonesia. Karya-karya dari para pendidik (guru) itu menampilkan sebuah gagasan yang sesuai dengan ideologi dan program pemerintah Orde Baru. Karya-karya tersebut merupakan wujud penginterpretasian terhadap nilai-nilai Pancasila yang kemudian dijadikan slogan oleh pemerintah yang berkuasa ketika itu dalam rangka mewujudkan tujuan kekuasaannya. Namun, dari segi tata naratifnya, karya-karya itu justru tidak sesuai dengan gambaran dunia anak yang sebenarnya (Norton, 1983, hlm. 9-10, Nurgiyantoro, 2005, hlm. 15). Dimensi propagandanya tampak lebih mencolok.

Keadaan serupa itu memunculkan sebuah pertanyaan mengenai tujuan dan implikasi dari program pemerintah Orde Baru dalam menjadikan lembaga kesastraan sebagai suatu cara yang bersifat politis dan ideologis. Melalui karya sastra anak rezim Orde Baru dapat menanamkan dan melestarikan cita-cita dan tujuannya. Anak-anak dididik dan didisiplinkan sesuai dengan yang diinginkan oleh rezim Orde Baru. Praktik-praktik kekuasaan melalui sastra ini menunjukkan adanya suatu mekanisme dalam mempertahankan, melestarikan, dan mendistribusikan kekuasaan pemerintah Orde Baru dan sekaligus menjadikan kesastraan sebagai praktik yang bersifat ideologis. Melalui kesastraan, kebaikan dan kehebatan program-program rezim Orde Baru dalam rangka membangun Indonesia diwacanakan dan ditanamkan.

Karya sastra anak terbitan Balai Pustaka yang hadir di tengah-tengah

masyarakat pada era 80-an berisi gagasan mengenai pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi tunggal diinterpretasikan dalam berbagai bentuk guna mendukung program pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, yakni yang sehat, berketuhanan, dan memiliki moralitas Pancasila.

Fenomena di atas sejalan dengan yang dikemukakan oleh Gramsci bahwa dunia gagasan, kebudayaan, superstruktur, bukan hanya sebagai refleksi atau ekspresi dari struktur kelas ekonomik atau infrastruktur yang bersifat material, melainkan sebagai salah satu kekuatan material itu sendiri. Sebagai kekuatan material, dunia gagasan atau ideologi berfungsi mengorganisasi massa manusia, menciptakan suatu tanah lapang yang di atasnya manusia bergerak (Faruk, 1999, hlm. 62). Sastra anak Balai Pustaka di era Orde Baru merupakan sebuah kekuatan material dalam melanggengkan ideologi Orde Baru.

Para pengarang sebagai kaum intelektual memiliki peran dalam menanamkan ideologi Orde Baru. Tujuannya adalah menghilangkan pengaruh Orde Lama, rezim yang berkuasa di era sebelumnya. Dengan menggunakan semboyan "kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen", Orde Baru mengembangkan gagasan dan menanamkan "kebenecian" dan kegagalan Orde Lama dalam menjalankan tugasnya membangun bangsa. Dengan cara demikian, Orde Baru dapat menghadirkan dirinya sebagai kekuatan hegemonik dan menyingkirkan pengaruh rezim Orde Lama. Melalui para intelektual yang berafiliasi dengannya, Orde Baru melanggengkan kekuasaan dan ideologinya melalui sastra anak pada generasi yang akan datang.

Pada tahun 80-an, Orde Baru berada dalam masa jaya atau masa subur di

mana seluruh sendi kehidupan bernegara tertata rapi sedemikian rupa sesuai dengan kehendak pemerintah. Begitu pula bacaan anak yang tersedia disesuaikan dengan idealisme pemerintah sebagai pelaku kuasa. Balai Pustaka sebagai penerbit menjadi alat strategi pemerintah, yaitu melahirkan karya-karya yang mendukung ideologi Orde Baru melalui gagasan pembangunannya, bahkan menjadikan gagasan tersebut sebagai acuan utamanya. Sastra anak juga harus mendukung gagasan yang demikian. Sebab, lembaga sastra dan lembaga pendidikan merupakan sarana yang paling efektif dalam melanggengkan dan menanamkan ideologi. Apalagi, para intelektual yang berada dalam lembaga tersebut berada di dalam kendali dan kuasa ideologi Orde Baru.

Sebagai konsekuensi dari langkah Orde Baru itu, sastra anak di luar Balai Pustaka pun mengalami nasib yang kurang beruntung bahkan dapat diasumsikan mati pupus dan hilang begitu saja. Mereka harus berebut kuasa dan posisi dengan sastra anak terbitan Balai Pustaka. Namun, Balai Pustaka adalah sebuah lembaga dan alat negara yang kuat dan hegemonik. Dia memiliki berbagai cara dan strategi untuk menyingkirkan sastra yang ada di luar Balai Pustaka.

Sastra anak Balai Pustaka sebagai hasil interpretasi terhadap pembangunan nasional berdasarkan Pancasila merupakan bukti ketundukan kelompok masyarakat terhadap ideologi pemerintah. Para penulis, yang bekerja sebagai praktisi pendidikan, adalah bagian dari kekuasaan rezim Orde Baru. Hal ini menimbulkan suatu diskusi mengenai cara atau strategi pemerintah Orde Baru dalam memanfaatkan lembaga pendidikan dan lembaga kesastraan untuk mendistribusikan dan “mengunci pikiran anak” dan sastra anak agar tetap setia dan patuh pada gagasan yang dibawa oleh sastra anak Balai Pustaka. Hal ini

memunculkan suatu persoalan tentang peran sastra yang berpolitik dan di bawah kuasa negara dalam memainkan perannya sebagai suatu lembaga sosial.

Gagasan yang dibawa oleh Balai Pustaka yang menjadi perpanjangan ideologi Orde Baru untuk dunia anak juga didukung oleh lembaga-lembaga yang lain, seperti penyiaran publik dan pendidikan. Jadi, operasi Balai Pustaka dalam sastra anak itu tidak sendirian, tetapi didukung oleh berbagai lembaga yang setia dan tersusun rapi dalam melanggengkan ideologi dan sekaligus membatat hegemoni dari masa sebelumnya. Bahkan, kemunculan gagasan yang berbeda pun akan tampak tersingkir dan harus dimatikan karena dianggap membahayakan kuasa dan ideologi yang tunggal, yakni Pancasila yang sesuai dengan tafsir Orde Baru. Legitimasi atas pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 inilah yang menjadikan dirinya begitu kuat dan didukung oleh masyarakatnya.

Berdasarkan hal tersebut, masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimanakah keterlibatan sastra anak Balai Pustaka era 80-an menjadi sebuah lembaga yang digunakan untuk menanamkan ideologi Orde Baru. Dari hal itu, perlu suatu pembahasan tentang isi ataupun topik karya sastra anak Balai Pustaka era 80-an dan strategi Balai Pustaka dalam menanamkan ideologi Orde Baru.

Penelitian ini memiliki dua tujuan. Pertama, mengetahui isi atau topik sastra anak Balai Pustaka dalam hal menginterpretasikan gagasan ideologi pembangunan Orde Baru. Kedua, menunjukkan strategi Balai Pustaka dalam memenangkan hegemoninya terhadap sastra anak era 80-an.

Untuk memecahkan persoalan dan mencapai tujuan tersebut, konsep yang digunakan adalah konsep hegemoni dari Gramsci. Menurut Frans (1999, hlm. 175, 177), teori hegemoni Gramsci merupakan kelanjutan penyempurnaan dari

teori politik Karl Marx. Hal serupa juga diungkapkan oleh Maliki (2012) bahwa teori Gramsci merupakan bagian dari kelanjutan teori Marxis atau yang disebut neo-Marxis (hlm. 148). Marx membagi ruang lingkup hidup manusia menjadi dua, basis atau dasar ekonomik (infrastruktur) dan bangunan atas (superstruktur)". Rahmawati (2013) mengatakan bahwa infrastruktur meliputi tenaga-tenaga kerja produktif dan hubungan-hubungan produksi" (hlm. 8). Pandangan serupa juga diungkapkan oleh Franz (1999) yang mengatakan bahwa superstruktur terdiri atas dua unsur, yakni tatanan institusional dan tatanan kesadaran kolektif" (hlm. 148). Menurut Rahmawati (2013, hlm. 8) tatanan institusional adalah segala macam lembaga yang mengatur kehidupan masyarakat di luar bidang produksi, terutama sistem hukum dan negara".

Menurut Faruk (2010), peranan kebudayaan dan ideologi akan dinafikan dengan sendirinya dalam perubahan sejarah. Gramsci menyatakan bahwa peranan ideologi dan kebudayaan (superstruktur) menjadi hal yang penting di samping kegiatan produktif (infrastruktur) (hlm. 129-130). Dalam kasus Revolusi Prancis, revolusi fisik terjadi setelah adanya revolusi ideologis yang merupakan kebangkitan dan penyebaran filsafat pencerahan (Faruk, 2010). Oleh karena itu, Gramsci menganggap penting superstruktur sebagai kekuatan material, bukan sekadar refleksi infrastruktur yang bersifat material" (hlm. 131). Jadi, karya sastra dalam posisi yang demikian merupakan material dari ideologi yang dikembangkan guna mendukung sebuah penguasaan dan tindakan.

Menurut Sugiono (2006), Gramsci menyempurnakan superstruktur dengan membaginya menjadi dua level utama. Pertama masyarakat sipil dan kedua masyarakat politik atau negara. Masyarakat sipil meliputi seluruh

aparatus transmisi yang disebut swasta, seperti universitas, sekolah, media massa, dan gereja. Adapun masyarakat politik adalah semua institusi publik yang memegang kekuasaan untuk melaksanakan perintah secara yuridis, seperti tentara, polisi, pengadilan, birokrasi, dan pemerintahan (hlm. 35)

Kedua level dalam superstruktur merepresentasikan dua ranah yang berbeda. Di dalam masyarakat sipil berlaku ranah persetujuan yang berkaitan dengan fungsi hegemoni. Menurut Sugiono (2006) hegemoni adalah menguasai dengan kepemimpinan moral dan intelektual secara konsensus. Adapun di dalam masyarakat politik berlaku ranah kekuatan yang berkaitan dengan dominasi langsung atau perintah yang dilaksanakan di seluruh negara dan pemerintahan 'yuridis'. Dominasi adalah kekuasaan yang ditopang dengan kekuatan fisik" (hlm. 35).

Menurut Gramsci (dalam Faruk, 1999), kriteria metodologis studinya didasarkan pada asumsi bahwa supremasi suatu kelompok sosial menyatakan dirinya dalam dua cara, yaitu sebagai "dominasi" dan sebagai "kepemimpinan moral dan intelektual" (hlm. 68). Hegemoni, oleh Gramsci, didefinisikan sebagai sesuatu yang kompleks, yang sekaligus bersifat ekonomis dan etis-politis. Dalam hegemoni harus diperhatikan interes-interes kelompok dan kecenderungan-kecenderungannya, yang terhadapnya hegemoni itu dijalankan. Walaupun hegemoni bersifat etis-politis, ia juga harus bersifat ekonomis, harus didasarkan pada fungsi yang menentukan, yaitu inti aktivitas ekonomi (Faruk, 1999, hlm. 68).

Inti aktivitas ekonomis tersebut merupakan prinsip pertama yang harus diperhitungkan, tetapi bukan merupakan satu-satunya determinan. Pada momen pertama mungkin terbentuk kesadaran kolektif yang bersifat ekonomis dalam

lingkup satuan sosial tertentu. Momen kedua adalah momen yang di dalamnya kesadaran solidaritas dicapai di antara seluruh anggota dari suatu kelas, tetapi masih dalam lapangan yang murni ekonomik. Momen ketiga adalah momen yang di dalamnya seseorang menjadi sadar bahwa interes korporasinya, dalam perkembangan yang sekarang dan akan datang, mengatasi batas-batas korporasi dari kelas yang secara murni ekonomik, melainkan menjangkau ke dalam kelompok-kelompok lain yang subordinat (Faruk, 1999, hlm. 68-69).

Menurut Rahmawati (2013) penyebaran ideologi untuk mencapai hegemoni tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi melalui fungsionaris hegemoni. Fungsionaris hegemoni yang dimaksud adalah kaum intelektual (hlm. 13). Gramsci membagi intelektual menjadi dua kelompok, yaitu intelektual organik dan tradisional. Intelektual organik adalah intelektual yang mengelaborasi ideologi kelompok dominan, memberikan kesadaran akan ideologi itu, dan mentransformasikannya menjadi suatu konsepsi yang kemudian harus disebarluaskan kepada seluruh masyarakat. Intelektual ini disebut sebagai intelektual organik karena membentuk hubungan organik antara kelas sosial yang direpresentasikannya dengan superstruktur". Sementara itu, Nezar dan Arief (2003) mengatakan bahwa intelektual tradisional merupakan intelektual otonom dan merdeka dari kelompok sosial dominan. Tugas intelektual tradisional adalah memutuskan ketidakmenentuan sikap dan bergabung bersama kelas-kelas yang revolusioner" (hlm. 13).

Seni dan kesusastraan dalam pandangan hegemoni Gramsci tidak sebagai gejala kedua yang tergantung dan ditentukan oleh infrastruktur, tetapi sebagai kekuatan sosial, politik, dan kultural yang berdiri sendiri dan mempunyai sistem sendiri yang terhubung dengan

infrastruktur. Jadi, sastra dianggap mampu mengontrol, membentuk, dan memelihara masyarakat dalam proses pencapaian hegemoni. Sastra dipahami sebagai institusi hegemoni yang mampu menyebarkan ideologi dalam rangka proses pencapaian hegemoni. Ideologi tersebut dimaksudkan sebagai hegemoni tandingan terhadap hegemoni penguasa. Di lain pihak, teks sastra dipahami sebagai tempat pertarungan ideologi-ideologi yang diciptakan penulis untuk mencapai hegemoni" (Rahmawati, 2013, hlm. 14).

METODE

Sebagai penelitian kualitatif penelitian ini memperhitungkan kualitas data, bukan kuantitasnya. Objek formal penelitian ini adalah ideologi pembangunan dalam karya sastra anak terbitan Balai Pustaka tahun 80-an. Objek material meliputi empat novel, yakni *Penyelamat Desa* karya Muhd. Yacob, *Taman Sekolah* karya Manto DG, *Bunga-Bunga Hari Esok* karya Sasmito, dan *Pandu Cucu Seorang Pejuang* karya A. Malik Thachir.

Data penelitian ini dibagi dalam dua bentuk, yakni data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian adalah informasi mengenai ideologi pembangunan dan ideologi Orde Baru, struktur teks atau tata naratif, dan sejenisnya yang terdapat dalam karya sastra yang menjadi objek material penelitian ini. Data sekunder penelitian ini adalah latar historis era tahun 80-an yang berhubungan dengan Orde Baru, masalah pembangunan Orde Baru, kelompok pengarang dan posisi Balai Pustaka dalam sastra anak, dan segala informasi yang berhubungan dengan topik penelitian. Data diperoleh dengan cara membaca dan mencatat segala informasi dari sumber data. Sumber data berasal dari karya sastra anak Balai Pustaka tahun 80-an seperti yang telah disebutkan dan segala sumber pustaka yang berhubungan dengan topik penelitian.

Dikatakan oleh Faruk (2012) bahwa interpretasi data harus dilandasi dengan konsep atau teori yang digunakan (hlm. 18-19). Sehubungan dengan itu, analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan mendasarkan pada teori yang digunakan, yakni model Gramscian. Langkah pertama adalah menentukan tata naratif yang berkenaan dengan ideologi dan pembangunan Orde Baru. Langkah kedua adalah menghubungkan struktur teks itu dengan latar sosiologis dan historis, yakni relasi antara ideologi, kuasa, kelompok intelektual, dan makna teks sastranya. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana operasi dan strategi ideologi dalam menghegemoni dan menjalankan kuasanya dalam kesastraan, terutama sastra anak era 80-an melalui Balai Pustaka. Semakin banyak pengaruh ideologi dalam alunan naratif yang terjalin menunjukkan semakin dominannya ideologi tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ideologi Pembangunan Orde Baru

Ideologi pembangunan Orde Baru merupakan dasar pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Dengan menggunakan slogan tersebut, Orde Baru secara tidak langsung telah membatalkan gagasan yang berkembang pada masa sebelumnya, yakni masa Orde Lama. Orde Lama dianggap tidak bisa melaksanakan ideologi tunggal negara dan hukum tertinggi negara, yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan gagasan yang demikian, Orde Baru telah mengokohkan dirinya sebagai pewaris sah dan sebagai rezim yang benar-benar melaksanakan amanah negara, yakni kembali pada Pancasila dan UUD 1945.

Untuk menguatkan gagasan yang demikian, segala aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat harus didasarkan pada ideologi tunggal yakni Pancasila. Hal serupa juga dilaksanakan

dalam gagasan tentang pembangunan nasional. Disebutkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) bahwa pembangunan Indonesia dititikberatkan pada pembangunan manusia dan masyarakat Indonesia seutuhnya. "Manusia dan masyarakat Indonesia seutuhnya" ini dapat dimanifestasikan sebagai manusia Pancasila (Tilaar, 1989, hlm. 267), yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan manifestasi sila pertama; juga yang berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggung jawab, mandiri, cerdas, dan terampil serta sehat jasmani dan rohani yang juga merupakan manifestasi sila-sila Pancasila. Gambaran ini dipandang sebagai manusia yang berkualitas, yakni memiliki kualitas spiritual, moral dan etika, dan mampu mencukupi kebutuhan ekonominya dengan cara bekerja keras dan mandiri.

Tujuan pembangunan Orde Baru adalah pelaksanaan Pancasila dengan menitikberatkan pada manusia secara mental, fisik, dan spritual. Namun, di balik pembangunan yang demikian ini ada suatu gagasan dan pemikiran tentang cara mempertahankan kekuasaan negara. Dengan menerapkan pembangunan yang demikian, pada hakikatnya manusia yang memiliki mentalitas itu adalah manusia yang mendukung kekuasaan negara. Jadi, pembangunan manusia Indonesia seutuhnya itu hanyalah manifestasi atau material dari ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila yang sesuai dengan interpretasi Orde Baru itu dimanfaatkan untuk melegitimasi kekuasaannya. Dengan menjalankan Pancasila dan UUD 1945, Orde Baru mengklaim dirinya sebagai penguasa tunggal, penguasa yang benar, dan patut dipertahankan. Untuk itu, segala aspek kehidupan, terutama pembangunan mentalitas manusia harus diarahkan untuk mencapai tujuan itu.

Ideologi yang menyertai pembangunan Orde Baru adalah satu usaha untuk mendukung otoritas dan kekuatan politik atau kekuasaan Orde Baru. Dalam konteks ini, hal ini diwujudkan dalam pembangunan manusia yang berdasarkan pada ideologi Pancasila. Jadi, ideologi pembangunan Orde Baru pada hakikatnya bukanlah yang terdapat dalam Pancasila sebagai falsafah negara. Namun, Pancasila hanya dimanfaatkan untuk mengesahkan, menguatkan, melegitimasi, dan menyatukan masyarakat Indonesia. Dengan dan atas nama ideologi Pancasila dan persatuan bangsa serta keamanan negara, kuasa Orde Baru dapat melanggengkan kekuasaan dan posisinya. Salah satunya melalui program pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Dengan demikian, ideologi pembangunan Orde Baru diwujudkan melalui kekuasaan untuk dirinya sendiri dan Pancasila sebagai alat untuk melegitimasi.

Anak-anak merupakan objek pembangunan. Di masa yang akan datang anak-anak adalah sang pembangun negara. Idealnya, anak-anak Indonesia sejak kecil perlu dibekali dengan nilai-nilai pembangunan supaya negara berhasil mewujudkan apa yang menjadi tujuannya sesuai dengan gambaran manusia Indonesia seutuhnya. Seorang anak yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup untuk membangun bangsanya dipandang sebagai manusia yang berkualitas. Namun, untuk tujuan keberlangsungan kuasa Orde Baru itu, anak-anak perlu didoktrin dan dididiki sedemikian rupa untuk tetap setia pada rezim yang berkuasa. Melalui senjata Pancasila dan UUD 1945, kata dan makna “pembangunan” dieksploitasi dan dimanifestasikan dalam berbagai wujudnya untuk tujuan penguasaan pada generasi berikutnya. Misalnya adalah gagasan tentang Repelita (Kesowo, et al. 1995, hlm. 187). Salah satu wujud dari usaha

untuk mendoktrin, mendidik, dan menguasai agar mereka kelak setia dan patuh untuk dikuasai itu melalui kesastraan dan lembaga pendidikan.

Sastra Anak Balai Pustaka sebagai Persemaian Kuasa Orde Baru

Topik-topik sastra yang dihasilkan oleh Balai Pustaka era 80-an mendukung semua program dan gagasan yang dirancang oleh Orde Baru. Karya yang berjudul *Penyelamat Desa* (Muhd Yacob), *Bunga-Bunga Hari Esok* (Sasmito), *Taman Sekolah* (Manto DG), dan *Pandu Cucu Seorang Pejuang* (A. Malik Thachir) menanamkan gagasan “pembangunan” yang dicanangkan Orde Baru sesuai dengan capaian yang digariskan dalam Repelita.

Topik kesetiaan pada masyarakat dan negara, rela berkorban untuk masyarakat, membangun desa terpencil, menjadi abdi negara yang patuh dan setia, dan menjunjung wibawa pemerintah dapat ditemukan dalam sastra anak Balai Pustaka 80-an, seperti yang terdapat dalam beberapa karya tersebut. Melalui gagasan dan topik yang demikian, anak-anak didoktrin dan ditanamkan kebaikan, kehebatan, dan kesaktian Orde Baru yang telah menyelamatkan bangsa dan masyarakat dari suatu kemunduran. Melalui bacaan yang bertema demikian pikiran dan jiwa anak-anak dikonstruksi sedemikian rupa untuk tetap setia, patuh tanpa syarat, dan penuh keikhlasan mendukung dan mengakui kuasa Orde Baru. Gagasan yang demikian dapat dilihat dari tataran naratif teks sastra anak Balai Pustaka tahun 80-an.

Tata naratif atau sisi tekstual sastra anak Balai Pustaka 80-an ini memunculkan gagasan pembangunan Orde Baru. Desa mendapat sorotan penting. Karya-karya sastra anak yang diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 1980-an kental dengan nuansa pedesaan yang mengentengahkan kehidupan masyarakat yang

miskin, pendidikan rendah, dan sarana yang masih kurang. Tema kepahlawanan juga terbit pada era ini. Perjuangan melawan penjajah menumbuhkan semangat patriotisme dalam membela keutuhan tanah air. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, setiap insan atau anak-anak Indonesia perlu dibekali dengan nilai-nilai Pancasila. Di dalam karya berjudul *Penyelamat Desa* (Muhd Yacob), *Bunga-bunga Hari Esok* (Sasmito), *Taman Sekolah* (Manto DG), dan *Pandu Cucu Seorang Pejuang* (A. Malik Thachir) ditanamkan unsur-unsur pembangunan Orde Baru.

Kebijakan pemerintah mengenai pendidikan nonformal yang dilangsungkan di pedesaan ini menjadi bukti bahwa pemerintah peduli atau bertanggung jawab terhadap pendidikan rakyatnya. Program pemerintah tersebut akan berhasil jika ada timbal balik dari peserta didik, sebagaimana terdapat dalam kutipan berikut.

“Ya, kurang apanya coba? Sekolahnya seminggu hanya tiga kali. Senin sore, Rabu sore, dan Jumat sore. Sekitar pukul 17.00 sampai pukul 21.30. Kemudian buku tulis dan pensilnya tidak usah membeli, buku pakatnya dipinjami. Waktunya lebih singkat. Kurang apanya coba, Pemerintah itu? semuanya serba dicukupi. Jadi, bisa mendapatkan ijazah atau tidak, semua tergantung kepada ketekunan, kemauan, dan kemampuan Saudara. Sudah jelas, Saudara?” (Sasmito, 1983, hlm. 35).

Tengkulak juga menjadi penghalang pembangunan di pedesaan. Hal inilah yang menjadi keprihatinan lima anak SD yang tinggal di sebuah desa terpencil, yaitu Yusuf, Rahim, Rahim, Jamin, dan Bakar. Mereka ikut memikirkan bagaimana mengatasi permasalahan yang selalu terjadi setiap tahun di desa mereka.

“Walaupun baik, kalau harganya terlalu murah itu artinya, ludes juga!

Sebelumnya para Tengkulak tentu menyusun rencana bagaimana mereka agar dapat membeli dengan harga relatif murah” (Yacob, 1982, hlm. 22).

“Tetapi sebelum itu kita usaha dulu, agar tengkulak-tengkulak tahun ini juga jangan lagi menipu kita. Penduduk harus disadarkan bagaimana mengatasi para Tengkulak,” ujar Rahim bersemangat (Yacob, 1982, hlm. 23).

Pembangunan juga dititikberatkan pada pengadaan sarana dan prasarana. Proyek-proyek besar diadakan oleh negara, misalnya pembangunan bendungan, jalan raya, lapangan terbang, gedung perkantoran, jembatan, pasar, dan sebagainya. Di pedesaan diadakan pembuatan jalan atau pengerasan jalan untuk memudahkan akses menuju kota atau wilayah lain sebagaimana yang tercantum dalam Repelita. Hal ini dikemukakan berkali-kali dalam *Penyelamat Desa*.

“Dari keterangan Pak Majid di Sekolah, katanya Pemerintah sedang mengadakan “Pelita” atau Pembangunan Lima Tahun, berturut sampai lima kali pelita. Pada Pelita Pertama ini Pemerintah memusatkan untuk membangun jalan-jalan!” (Yacob, 1982, hlm. 23).

“Mulai 1 April tahun depan pemerintah akan melaksanakan pembangunan Lima Tahun (Pelita) Pertama.”

“Oh ya, aku telah ingat sekarang, dalam pelita pertama ini Pemerintah akan memperbaiki jalan-jalan, bukan?” kata Yusuf setelah teringat kembali pelajaran Kewargaan Negara lalu (Yacob, 1982, hlm. 50).

Pembangunan di segala bidang dinilai telah berhasil. Salah satunya adalah pembangunan sekolah-sekolah di pedesaan sehingga mereka tidak perlu jauh-jauh ke kota atau ke desa lain. Kemudahan mendapatkan akses pendidikan

menunjukkan kemajuan bangsa, sebagaimana terdapat dalam *Taman Sekolah*.

“Anak-anak, hari ini adalah hari Pahlawan, yaitu tanggal 10 Nopember. Berkat kemurahan Tuhan Yang Maha Esa, dan perjuangan para pahlawan, bangsa kita, telah lama merdeka. Pemerintah negara kita, berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, dengan jalan melaksanakan pembangunan di segala bidang. Di antaranya adalah SD Inpres di desa kita ini. Dengan adanya SD Inpres di desa Cupang, Pemerintah berharap, agar rakyat desa Cupang, memiliki kesempatan belajar dengan mudah. Suatu kesempatan yang baru kita miliki. Sebab, kita tak perlu bersusah payah pergi ke desa lain, yang telah ada sekolahnya. Oleh karena itu, Bapak berpesan kepadamu pergunakan kesempatan ini dengan baik, tingkatkan semangat belajarmu.” (Manto, 1983, hlm. 23)

Pancasila menjadi asas seluruh sendi kehidupan. Salah satu peran guru sebagai pendidik tunas bangsa adalah mengajarkan sendi-sendi Pancasila kepada para peserta didiknya, sebagaimana terdapat dalam *Taman Sekolah*.

“Nilai-nilai hidup dapat diterima oleh seluruh bangsa kita adalah Pancasila. Pancasila, merupakan dasar negara kita. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa kita. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa kita. Yang di dalamnya berisikan nilai-nilai luhur kehidupan bangsa kita dari zaman dahulu, hingga sekarang,” kata Pak Yahya kemudian. “Oleh karena itu, kita selaku bangsa Indonesia harus meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan Pancasila. Sehingga kita dapat merasakan Pancasila sebagai semangat dan jiwa bangsa kita” (Manto, 1983, hlm. 79).

Anak-anak perlu dibekali pengertian mengenai pahlawan. Pahlawan bukan hanya orang yang berperang melawan

penjajah. Anak-anak termasuk pahlawan pembangunan karena di pundak generasi mudalah kelak negara ini ditentukan. Untuk menjadi pahlawan bangsa ada syaratnya, yaitu niat. Sebab segala sesuatu yang dilakukan untuk membangun negara akan bernilai baik jika diawali dengan niat. Kakek Pandu dalam *Pandu Cucu Seorang Pejuang* menuturkan sebagai berikut.

“Betul... Ada pahlawan perang kemerdekaan, pahlawan perintis kemerdekaan, ada pahlawan revolusi dan bahkan ada pahlawan pembangunan. Dan, kita kelak, mungkin masuk dalam pahlawan pembangunan. Itu pun ada syarat-syaratnya. Syarat yang utama adalah niat. Niat kita untuk membangun. Niat untuk meneruskan cita-cita para pejuang bangsa. Kita isi kemerdekaan ini dengan membangun. Termasuk tugas kita di tempat yang baru nanti.” (Thachir, 1986, hlm. 36)

Gagasan sastra anak yang demikian ini juga tidak berhenti pada sastra anak saja. Lembaga-lembaga yang lainnya juga ikut berperan besar dalam menanamkan kuasa Orde Baru pada pikiran dan jiwa anak-anak Indonesia. Salah satu peran yang kuat adalah lembaga pendidikan. Pendidikan menjadi sarana sosialisasi dan pelestarian atau pembentukan nilai-nilai yang ada. Negara memberikan instruksi dan sekaligus menguasai lembaga pendidikan untuk menggiring atau menjadikan lembaga itu bagian dari kuasa Orde Baru. Lembaga pendidikan menjadi alat dan sarana untuk mendukung kuasanya. Para intelektual di dalamnya, seperti guru atau pendidik, adalah posisi yang strategis bagi Orde Baru untuk menanamkan dan membentuk pikiran anak agar patuh dan secara sukarela mengakui dan membutuhkan pemerintah Orde Baru.

Hal inilah yang mendorong kelahiran sastra anak Balai Pustaka tahun 80-

an. Lomba penulisan sastra anak untuk para pendidik ini menjadi bukti cara beroperasinya kuasa Orde Baru dalam menanamkan kuasanya melalui strategi hegemoni. Para pengarang yang sebagian besar adalah praktisi pendidikan dapat dijadikan contoh tentang cara mendidik dan seharusnya berperilaku pada pemerintah. Ungkapan guru adalah ditiru dan dijadikan panduan menjadi alat untuk dipilihnya pendidik dalam rangka memperpanjang kuasa Orde Baru. Para guru juga telah terhegemoni oleh kuasa Orde Baru sehingga dengan sukarela mengikuti dan melestarikan nilai-nilai dan gagasan yang diinginkan oleh Orde Baru.

Dengan topik yang sesuai gagasan Orde Baru, sastra anak ini diedarkan ke lembaga-lembaga pendidikan. Lomba penulisan sastra anak juga sebagai sarana untuk menanamkan dan memahami para intelektual dalam menginterpretasikan dan melestarikan gagasan Orde Baru. Dalam posisi ini, ada dua keuntungan yang dimiliki oleh Orde Baru dalam melestarikan dan menyemaikan kekuasaannya. Pertama, para pendidik yang menulis sastra anak itu akan diketahui oleh Orde Baru (aparatus kuasa Orde Baru) dalam menginterpretasikan dan mendukung programnya. Atau dengan kata lain, penulisan sastra anak itu untuk menguji kesetiaan, kepatuhan, dan rasa sukarela dari kelompok intelektual di lembaga pendidikan dalam mendukung kekuasaan Orde Baru. Kedua, para pendidik itu sekaligus ditanamkan dan disosialisasikan atau dibentuk pikirannya agar setia dan patuh bahkan bersyukur kebaikan Orde Baru yang memberikannya kesempatan untuk berperan dalam mendidik anak bangsa salah satunya melalui kesastaraan yang ditulisnya.

Sementara itu, bagi anak-anak, sastra Balai Pustaka yang ditulis oleh para pendidik melalui lomba tersebut akan menjadi bahan bacaan yang “dikonsumsi”. Guru mereka tentu akan memilihkan

bacaan tersebut dengan berbagai alasan, seperti karena sang guru yang menulis maka guru itu akan bercerita dan mendidik anak didiknya seperti yang ditulisnya. Selain itu, sastra anak Balai Pustaka itu pasti disediakan di perpustakaan sekolah dalam jumlah yang dominan. Apalagi didukung oleh keadaan dan kelangkaan bahan bacaan di sekolah-sekolah inpres ataupun sekolah para penduduk pada umumnya. Tentu saja, bahan bacaan anak yang lain tidak mungkin bisa masuk dan tentu akan diseleksi sedemikian rupa agar bisa masuk ke dalam perpustakaan sekolah. Hal ini akan berbeda dengan sekolah yang bukan milik pemerintah, seperti pondok pesantren, yang tentu saja bahan bacaan untuk peserta didiknya akan berbeda. Begitu juga dengan kelompok elit dan intelektual yang lain, seperti munculnya pasar buku bacaan anak yang berbeda dengan Balai Pustaka era 80-an.

Sastra Anak Balai Pustaka dan Sastra Anak Non-Balai Pustaka

Pemerintah Orde Baru menentukan suatu tatanan. Ada aturan yang dimanifestasikan dalam bahasa, misalnya dalam berbicara, mengeluarkan ide dalam bentuk tulisan, dan tingkah laku. Bentuk murninya salah satunya diciptakan dalam pembuatan kebijakan-kebijakan dan bagaimana penerapannya dalam karya sastra anak Balai Pustaka tahun 80-an. Penerapan ideologi pembangunan dalam pelaksanaannya dijadikan kewajiban bagi semua orang atau sekelompok kecil yang menulis karya tersebut, lembaga yang menerbitkan, dan anak-anak yang membacanya. Mengenai kedekatan sosok pemimpin negara sebagai penggerak pembangunan nasional dicerminkan dalam buku *Anak Indonesia dan Pak Harto* terbitan Citra Lamtoro Gung Persada (Dwipayana, 1991). Buku ini menunjukkan kecintaan anak-anak Indonesia

kepada pemimpin mereka, yakni Bapak Soeharto.

Era 80-an ini banyak ditemukan buku sastra anak dengan label *Milik Negara Tidak Diperdagangkan*. Buku-buku tersebut tersedia di sekolah-sekolah karena merupakan program bantuan buku dari pemerintah. Pada masa itu, kurikulum pendidikan juga diwarnai dengan penanaman nilai-nilai perjuangan bagi anak-anak sekolah. Maka direalisasikan mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB), sedangkan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila maka diwajibkan mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) di sekolah.

Gagasan pembangunan Orde Baru itu diterapkan dalam dunia anak. Anak dididik untuk bisa mendukung legitimasi kekuasaan Orde Baru. Atau dengan kata lain, doktrin tentang kekuasaan Orde Baru sudah harus diterapkan dalam dunia dan pemikiran anak-anak. Sastra ataupun bacaan anak menjadi salah satu alternatif dalam menamakan gagasan yang demikian. Hal ini menunjukkan bahwa sastra anak menjadi semacam arena perebutan dan negosiasi ideologi dan gagasan Orde Baru. Fakta ini memberikan bukti bahwa kekuasaan Orde Baru menjalar ke segala arah dan menghegemoni pemikiran, pengalaman, dan dunia anak-anak melalui serangkaian kuasa yang dimainkan.

Langkah yang dilakukan oleh Orde Baru yang pertama adalah membatalkan gagasan kesastraan yang berkembang pada masa sebelumnya. Hal ini dicontohkan dengan gagasan estetika realisme sosialis dari Partai Komunis Indonesia ataupun gagasan estetika tentang sastra yang dikembangkan oleh aliran kebudayaan yang berafiliasi dengan agama Islam, misalnya Lembaga Kebudayaan Seniman Muslimin Indonesia. Kedua aliran estetika ini dipandang sebagai ancaman dalam melanggengkan kuasa Orde Baru. Orde Baru berpikir bahwa hanya ada

estetika tunggal dan estetika itu harus mendukung kuasanya sekaligus dikendalikan oleh kuasanya. Maka, Orde Baru pun membuat sebuah estetika dalam kesastraan sesuai dengan keinginannya, misalnya kemunculan majalah *Budaya Jaya*, lembaga kesenian (Dewan Kesenian) ataupun *Horison* sebagai kelanjutan dan perpanjangan Orde Baru yang didukung dan dibiayai negara dan pihak-pihak tertentu.

Langkah berikutnya adalah membuat sebuah kategori tentang sastra dan bukan sastra ataupun sastra yang tinggi dengan sastra yang rendah hingga sastra yang patut dibicarakan dengan sastra yang disingkirkan ataupun sastra yang diizinkan dengan sastra yang terlarang. Kategori-kategori inilah yang dijadikan sebagai panduan dalam kesastraan ataupun bacaan anak. Sebagai konsekuensinya, kemunculan sastra anak selain sastra Balai Pustaka diberi ruang hanya bila sesuai dengan kategori estetika yang dikemukakan. Sebaliknya, bila sastra anak itu tidak sesuai dengan kategori yang diinginkan oleh Orde Baru, maka sastra itu disingkirkan, dipandang bukan sastra yang baik, atau sastra itu dilarang. Sastra anak yang demikian diberi label seperti sastra anak tidak bermutu dan tidak layak dibaca.

Meskipun dicap sedemikian rupa, sastra anak yang demikian itu tetap hadir meskipun berada di pinggiran dalam wacana estetika kesastraan Indonesia. Sang penerbit dan pengarang sebagai aktor intelektual melakukan berbagai strategi kompromis agar sastra yang dituliskannya bisa terbit. Sebab, konsumennya sangat berbeda dengan sastra anak Balai Pustaka meski kedua-duanya tetap memperebutkan ruang dan objek yang serupa, yakni anak-anak. Hasil kompromi dan negosiasi itu adalah bahwa sang aktor intelektual "menerima atau mengizinkan" bila karya sastranya dicap sebagai sastra anak yang tidak bermutu. Hal

ini tidak menjadi persoalan asalkan gagasan dan ideologi yang diemban dapat disampaikan.

Sebagai contoh adalah kemunculan bacaan anak yang berupa komik surga dan neraka, seperti *Pedihnya Siksa Neraka*, *Taman Surga*, dan *Siksa Neraka*. Bacaan itu menggambarkan siksa neraka dan kenikmatan surga. Karya ini dikemas dalam bentuk buku murahan dan beredar di pasar tradisional. Bahkan, karya ini tidak dapat masuk dalam perpustakaan sekolah atau pemerintah dan toko buku. Dia dijual di terminal, stasiun kereta api, atau pasar tradisional. Bacaan ini dicap sebagai sastra murahan, sastra yang tidak layak disebut sastra, dan sejenisnya sehingga tidak dibicarakan dalam forum akademik ataupun masuk sekolah. Namun, bacaan ini justru laku di pasar dengan bukti munculnya bermacam-macam bacaan serupa.

Bacaan ini telah dicap bukan sastra dan tidak layak dibicarakan. Namun, pengarang justru melakukan negosiasi dengan sastra yang bukan versi pemerintah. Dengan mengemasnya dalam buku yang murahan dan beredar dengan cara yang tidak prestisius seperti sastra anak yang lain, sastra jenis ini bisa tetap di tangan konsumen. Selain itu, dengan memanfaatkan ajaran agama Islam terutama mendasarkan ayat-ayat Alquran, pemerintah tentu saja tidak berani melarang sastra ini. Sebab, dengan melarangnya terbit maka kuasa Orde Baru sama halnya melarang ajaran dan dakwah Islam. Hal ini akan berpotensi pada pemberontakan dan membawa konsekuensi yang lebih hebat bagi keberadaan kuasanya. Isi karya sastra jenis ini sesungguhnya mengecam kekejaman dan cara Orde Baru dalam menjalankan pemerintahan, seperti azab bagi mereka yang korupsi, azab bagi mereka yang hedonis dan melupakan agama, dan azab bagi pemimpin yang tidak adil. Bahkan, ada juga sastra jenis ini dengan menampilkan

kepemimpinan para sahabat Nabi Muhammad saw, yang memimpin dengan adil dan bijaksana, seperti *Abu Bakar Siddik, Khalifah Pertama* (1977, terbit ulang 1982) karya Zuber Usman. Karya ini justru tidak populer dan secara sistematis disingkirkan oleh wacana estetika kesastraan di masa Orde Baru.

Hadirnya jenis sastra anak ini menunjukkan bahwa telah terjadi perebutan kuasa atau hegemoni dalam ruang bacaan kesastraan untuk anak di Indonesia. Bila SD atau SMP Inpres mendapatkan buku Balai Pustaka, sebaliknya, sastra jenis ini bermain di luar arena tersebut. Fakta ini menunjukkan bahwa terjadi perebutan antara sastra versi Orde baru dan non-Orde Baru dalam hal pasar dan konsumen sastranya. Mereka membiarkan pemikiran dan gagasan yang berbeda itu bermain dalam wilayahnya masing-masing. Sebab, yang kuasa dan hegemonik merasa memiliki massa yang cukup banyak sehingga dimungkinkan sastra non-Balai Pustaka itu tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Namun, keberadaan sastra yang demikian itu tetap disingkirkan dan dimatikan dengan pembentukan wacana estetika tentang sastra yang baik dan harus dibaca sebab mereka tetap dipandang sebagai ancaman.

Hal serupa juga berbeda perlakuan dengan sastra terjemahan dari Barat, terutama Eropa dan Amerika. Penerbit Gramedia menjadi sponsor dari jenis sastra ini. Menurut estetika sastra realis sosialis atau mungkin Islam pada masa Orde Lama, sastra sejenis ini menampilkan petualangan yang anarkis, sensasi, *superhero*, kebandit-banditan, *science fiction* yang sok ilmiah, keperkasaan lokal yang dibelokkan, dan lain-lain. Sastra ini merupakan sastra imperialis yang menyebar ke Indonesia melalui terjemahan (Mumtaz, 2014, hlm. 47). Namun, sastra ini dapat perlakuan khusus, sebab dia dipandang sebagai sastra yang baik. Hal ini

berhubungan dengan cara pandang ke-sastraan yang berbeda dengan generasi sebelumnya, yakni masa Orde Lama. Sastra yang dilarang dan dianggap bukan sastra pada masa Orde Lama kini dipandang sebagai sastra yang baik dan sastra yang sesungguhnya di masa Orde Baru.

Sastra anak yang terbit di luar Balai Pustaka juga ada yang mendukung kuasa Orde Baru. Sastra ini justru menguatkan hegemoni kekuasaan Orde Baru. Sastra jenis ini dapat dianggap sebagai sastra yang terhegemoni kekuasaan Orde Baru. Ataupun, para pengarang sebagai intelektual dan penerbit lembaga ke-sastraan dapat dicurigai sebagai alat dan perpanjangan Orde Baru. Ataupun, keduanya tidak sadar telah dikuasai dan mengikuti aturan estetika Orde Baru. Karya sastra jenis ini diterbitkan oleh lembaga sastra, seperti Pustaka Jaya, Kinta Jakarta, dan Tiga Serangkai. Mereka menampilkan topik dan tema yang serupa dengan gagasan estetika yang dikemukakan oleh Orde Baru, terutama sekali gagasan sastra anak Balai Pustaka. Sebagai contoh adalah *Mutiara dalam Derita* (1982) karya D. Zawawi Imran dan *Mewujudkan Sebuah Impian* (1983) karya Zubir Mukti.

Kuasa Orde Baru itu tidak hanya tampak melalui konteks di luar teks seperti yang telah disebutkan. Namun, kuasa yang menghegemoni dunia dan pengalaman anak-anak itu dilakukan melalui teks sastranya itu sendiri. Dengan menampilkan tema-tema dan persoalan pembangunan Orde Baru, isi karya sastra menjadi semacam "pengalaman anak yang dipaksakan". Dunia dan pengalaman anak-anak dipaksa untuk mengikuti pola dan struktur yang digunakan oleh Orde Baru. Sebagai contoh adalah gagasan tentang menjadi pegawai negeri yang patuh, guru yang membangun masyarakat tertinggal, ataupun menjadi tentara untuk membela masyarakat dan negara. Wacana yang lain dimatikan dan tidak

muncul, seperti anak yang ingin menjadi pengusaha, anak yang ingin menjadi pejabat yang bersih dan baik, dan anak yang ingin mendalami ilmu agama. Strategi yang demikian ini adalah salah satu cara teks sastra anak Orde Baru menghegemoni dunia dan pemikiran anak Indonesia.

Karya sastra anak yang diterbitkan Balai Pustaka adalah cerita realistik yang mengetengahkan permasalahan dunia anak seputar keterbelakangan ekonomi dan pendidikan. Pengarang menampilkan permasalahan dengan menggambarkan ketidaksesuaian antara keadaan sang anak dengan bagaimana seharusnya. Solusi atau penyelesaian permasalahan yang ditawarkan adalah kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Orde Baru. Program pemerintah seakan menjadi wacana pamungkas yang membuat anak terentaskan dari permasalahan yang menghimpit negara. Pembangunan rumah sehat, jalan, sekolah, dan pemberian modal usaha adalah solusinya. Permasalahan-permasalahan tersebut sama dengan permasalahan yang harus diatasi atau diselesaikan oleh orang dewasa. Dengan demikian, anak-anak masuk dalam permasalahan orang dewasa. Tidak ada perbedaan antara sastra anak dan sastra dewasa. Sastra yang mendukung pemerintahan seperti itulah yang mendapat kesempatan untuk diterbitkan oleh Balai Pustaka.

Meskipun oleh negara karya-karya yang diterbitkan Balai Pustaka tersebut dipandang sebagai karya yang tepat untuk anak-anak, kebenaran menurut pihak lain tidak sama. Pihak lain atau masyarakat memandang bahwa karya tersebut tidak tepat sebab karya tersebut tidak layak untuk anak-anak atau melampaui dunia anak-anak. Beberapa di luar Balai Pustaka menunjukkan kebenaran-kebenaran menurut persepsi mereka sendiri sebagai wujud pembebasan dari patokan sastra anak yang sudah ada,

misalnya munculnya buku-buku anak dengan tema universal yang digemari anak-anak sebagai bacaan lain selain Balai Pustaka.

Namun, tidak semua strategi pemerintahan Orde Baru menumbuhkan hasil yang diharapkan. Hal ini ditunjukkan dengan tidak semua pihak terhegemoni oleh pemerintah sebagai pemegang otoritas kepemimpinan negara melalui sastra anak Orde Baru versi Balai Pustaka. Sekelompok golongan takluk terhadap ideologi-ideologi pembangunan Orde Baru. Pada sisi lain, terdapat gagasan lain yang dapat dikatakan sebagai gagasan tandingan. Hal ini tidak bisa dimungkiri bahwa tidak semua ideologi pembangunan bisa diterapkan di seluruh lapisan masyarakat. Pemunculan sastra anak Balai Pustaka tahun 80-an dengan tema-tema pembangunan Orde Baru merupakan salah satu bentuk strategi. Banyak ahli mengemukakan bahwa kemunculannya tidak menumbuhkan hasil yang signifikan dengan alasan tidak sesuai dengan dunia anak-anak (Sarumpaet, 2010, hlm. 11).

Hal ini menunjukkan bahwa konsep estetika sastra anak Orde Baru versi Balai Pustaka tidak begitu berhasil dan tidak mendapatkan sambutan yang baik dalam dunia anak. Namun, para pendukung konsep estetika sastra Balai Pustaka yang berada di luar Balai Pustaka justru mendapatkan sambutan dengan dimasukkannya karya sastra mereka sebagai sastra layak dibaca dan sastra anak yang sesungguhnya. Hal ini berkat kemasan dan penyajian topik yang tidak begitu dipaksakan pada anak. Para pengarang atau intelektual yang dipilih oleh Balai Pustaka tidak mampu menghadirkan estetika sastra anak Orde Baru melalui topik atau tata naratif yang bisa diterima oleh anak. Justru, para intelektual di luar jaringan Balai Pustaka berhasil menghadirkan topik dan estetika sastra anak Orde Baru dalam karya-karya

sastra mereka. Sebagai konsekuensi, hegemoni Orde Baru atas dunia anak berhasil dilakukan oleh estetika sastra anak Orde Baru di luar versi sastra anak Balai Pustaka.

SIMPULAN

Uraian tersebut menunjukkan bahwa sastra anak Balai Pustaka era 80-an oleh rezim Orde Baru digunakan sebagai alat untuk menanamkan ideologi Orde Baru dalam rangka mempertahankan hegemoninya. Hegemoni yang digunakan untuk menguatkan posisi dan kekuasaannya dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, "pemaksaan" atau pendoktrin-an pikiran anak-anak melalui teks sastra yang diterbitkan oleh Balai Pustaka beserta teks-teks sastra yang mendukung atau setopik dengan sastra anak Balai Pustaka. Kedua, pemerintah Orde Baru menjalankan hegemoninya dengan cara di luar teks atau isi kesastraan. Hal itu dilakukan dengan cara membuat konsep estetika tentang sastra, yang berlaku juga untuk sastra anak, misalnya pembabatan dan pembunuhan konsep estetika sastra era sebelumnya dan juga sastra yang bertopik Islam. Ketiga, melalui lembaga kesastraan dan pengarang atau aktor intelektual, pemerintah Orde Baru menjalankan doktrin ideologinya dengan cara menerbitkan dan menguasai bacaan anak di Indonesia.

Meskipun demikian, karya sastra anak yang lain terbit dan hadir di masa itu. Karya sastra ini ada yang mendukung dan berseberangan dengan kuasa Orde Baru. Karya sastra yang mendukung kuasa Orde Baru ini mendapat perlakuan khusus dengan dianggap sebagai sastra yang baik, sastra yang dibicarakan, dan sastra yang diakui. Bahkan, karya sastra ini dipandang berhasil dalam menjalankan kuasa Orde Baru sebab dapat menginterpretasikan topik (ideologi pembangunan) yang diinginkan oleh estetika sastra Orde Baru. Sementara itu,

sastra yang tidak mendukung kuasa Orde Baru disebut sastra yang tidak baik ataupun sastra murahan. Hal ini dicontohkan dengan sastra yang bertopik ajaran Islam, misalnya karya yang bertopik surga dan neraka, yang juga mengungkapkan kebobrokan pemerintah Orde Baru dan aparatusnya, seperti melakukan korupsi dan dosa-dosa lainnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel ini ditulis sebagai salah satu hasil riset payung yang didanai oleh Fakultas Ilmu Budaya UGM dengan topik "Kuasa Wacana Kolonial dalam Sastra Indonesia". Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Fakultas Ilmu Budaya UGM yang telah mendanai penelitian ini dan Dr. Pujiharto, M.Hum. selaku ketua riset payung.

DAFTAR PUSTAKA

- Dg, Manto. (2007). *Taman sekolah*. (Cetakan kelima, cetakan pertama tahun 1983). Jakarta: Balai Pustaka.
- Faruk. (1999). *Pengantar sosiologi sastra dari strukturalisme genetik sampai post modernisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- (2010). *Pengantar sosiologi sastra dari strukturalisme genetik sampai post modernisme*. (Edisi revisi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- (2012). *Metode penelitian sastra, sebuah penjelajahan awal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dwipayana, G. dan S. Sinasari (Ed.). (1991). *Anak Indonesia dan Pak Harto*. Jakarta: Citra Lamtoro Persada.
- Franz, M. S. (1999). *Pemikiran Karl Marx: Dari sosialisme utopis ke perselisihan revisionisme*. Jakarta: Gramedia.
- Kesowo, B, Martoredjo, W, dan Soedarno, S. (1995). *40 tahun Indonesia merdeka*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Latonda. (1978). *Lolos*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Maliki, Z. (2012). *Rekonstruksi teori sosial modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mukti, Z. (1982). *Mewujudkan sebuah impian*. Jakarta: PT Kinta.
- Mumtaz, F. (2014). "Membongkar kubur Sugiarti Siswadi: Sebuah kajian *new historicism*" (Tesis, tidak diterbitkan). Magister Ilmu Religi dan Budaya. Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
- Nezar, P dan Arief, A. (2003). *Antonio Gramsci negara dan hegemoni*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Norton, D. E. (1983). *Through the eyes of a child, an introduction to children's literature*. Ohio: Charless E. Merrill Publishing Co.
- Nurgiyantoro, B. (2005). *Sastra anak, pengantar pemahaman dunia anak*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rahimsyah, AR, BR. (tanpa tahun). *Pedihnya siksa neraka*. Surakarta: Delima Solo.
- Rahimsyah, AR, BR, dan Anam, I. (tanpa tahun). *Siksa neraka*. Surabaya: Pustaka Agung Harapan.
- Rahmawati, F. (2013). "Ideologi tokoh utama dalam novel *Rihlah Ila Allah* karya Najib Al-Kailaniy: Analisis hegemoni Gramsci" (Tesis, tidak diterbitkan). Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sarumpaet, R.K.T. (2010). *Pedoman penelitian sastra anak*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sasmito. (2007). *Bunga-bunga hari esok*. (Cetakan kedelapan, cetakan pertama tahun 1983). Jakarta: Balai Pustaka.
- Sugiyono, M. (2006). *Kritik Antonio Gramsci terhadap pembangunan*

- dunia ketiga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Thachir, A. M. (2007). *Pandu cucu seorang pejuang*. (Cetakan kedua, cetakan pertama tahun 1986). Jakarta: Balai Pustaka.
- Tilaar, H.A.R. (1989). "Pendidikan nasional & pembangunan manusia seutuhnya dalam repelita V". Makalah dalam Seminar Gereja dan Masyarakat oleh GPI, Jakarta, 21 Februari.
- Wardana, E. (tanpa tahun). *Taman surga*. Surabaya: Pustaka Agung Harapan.
- Yacob, M. (2007). *Penyelamat desa*. (Cetakan kedua, cetakan pertama tahun 1982). Jakarta: Balai Pustaka.